



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 432347

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.722.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 185 m2/98 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 262.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 487 m2/392 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.785.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 3.675.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 406.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.700.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 21.893.584

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.152.093.584

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.152.093.584

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.